



Katalog BPS : 3206001 .3471

GINI RASIO KOTA YOGYAKARTA

2010



**KERJASAMA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA YOGYAKARTA
DENGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

COOPERATION BETWEEN
BPS - STATISTIC OF YOGYAKARTA CITY
WITH REGIONAL GOVERNMENT OF YOGYAKARTA CITY



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA YOGYAKARTA**

GINI RASIO KOTA YOGYAKARTA 2010

I S B N : 979.472.9744
Nomor Publikasi : 34710.11.007
No. Katalog : 3206001.3471
Ukuran Buku : 21 cm x 28 cm

Naskah
Badan Pusat Statistik
Kota Yogyakarta

Gambar Kulit
Badan Pusat Statistik
Kota Yogyakarta

Diterbitkan oleh
Badan Pusat Statistik
Kota Yogyakarta

Dicetak oleh

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Strategi pembangunan yang dianut pemerintah kita adalah trilogi pembangunan, dengan pengertian bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mengacu pada ketiga unsur, yaitu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Ketiga unsur tersebut harus bergerak maju secara selaras, seimbang dan saling mendukung.

Dalam pembangunan saat ini, kedua unsur trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dirasakan sudah cukup berhasil, karenanya masalah pemerataan pembangunan menjadi isu nasional yang cukup hangat. Sehubungan dengan hal tersebut, prioritas untuk memerangi kemiskinan dengan cara mencari/mengamati kantong-kantong kemiskinan telah dilakukan secara serius dan terpadu, sehingga komitmen pemerintah untuk menghapus penduduk miskin akan dapat terwujud.

Selain itu tujuan pembangunan nasional tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga telah memberikan penekanan dengan bobot yang sama kepada aspek peningkatan tingkat pendapatan masyarakat dan aspek pemerata.

Kesenjangan pembangunan secara umum selama ini berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk dan aspek. Bukan saja berupa kesenjangan hasil-hasilnya, misalnya dalam hal pendapatan per kapita, tetapi juga kesenjangan dalam proses distribusinya. Bukan pula semata-mata berupa kesenjangan antar daerah, akan tetapi juga berupa kesenjangan ekonomi dalam lapisan masyarakat yang ada. Dari segi normatif, upaya untuk mengurangi kesenjangan merupakan salah satu tujuan pembangunan yang harus dicapai, terlebih bagi pemerintah yang saat ini perannya semakin strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat lokal selain karena adanya penguatan peran pemerintah daerah berbagai konsekuensi logis dari penerapan otonomi yang tengah berlangsung saat ini.

Semangat otonomi daerah yang dinaungi oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2004 memberi nuansa baru dalam pembangunan daerah. Setiap daerah, berlomba meningkatkan daya saing daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan

GINI RASIO KOTA YOGYAKARTA 2010

I S B N : 979.472.9744
Nomor Publikasi : 34710.11.007
No. Katalog : 3206001.3471
Ukuran Buku : 21 cm x 28 cm

Naskah
Badan Pusat Statistik
Kota Yogyakarta

Gambar Kulit
Badan Pusat Statistik
Kota Yogyakarta

Diterbitkan oleh
Badan Pusat Statistik
Kota Yogyakarta

Dicetak oleh

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

PAD diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan daerah. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan daerah merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan daerah yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila (Kartasmita, G, 1996).

Ada berbagai cara untuk mengetahui prestasi pembangunan suatu daerah salah satunya dengan pendekatan ekonomi yaitu berdasarkan tinjauan aspek pendapatan. Dalam aspek pendapatan digunakan konsep pendapatan perkapita, namun hal tersebut belum cukup untuk menilai prestasi pembangunan karena tidak mencerminkan bagaimana pendapatan sebuah daerah terbagi di kalangan penduduknya, sehingga tidak memantau unsur keadilan atau pemerataan, untuk itu diperlukan adanya data mengenai pemerataan distribusi pendapatan.

Masalah ketimpangan pendapatan, atau lebih populer disebut kesenjangan, baik antar individu, antar kelompok, antar sektor maupun antar daerah perlu mendapat penanganan segera karena akan berdampak negatif baik terhadap stabilitas politik maupun stabilitas ekonomi. Peran besar Pemerintah dalam pengalokasian dana pembangunan untuk pelayanan publik, diantaranya bagi sektor pendidikan dan kesehatan, telah memungkinkan berkurangnya masalah kemiskinan yang merupakan salah satu "cacat" dalam keberhasilan pembangunan ekonomi selama ini (Priyono Tjiptoherijanto, 2004).

Disamping kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah pembangunan dan tujuan utama kebijakan pembangunan, kemiskinan merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari ketimpangan distribusi pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk yang semakin tinggi menunjukkan bahwa semakin lebar kesenjangan pendapatan orang kaya dan orang miskin. Bila kondisi seperti ini yang terjadi di suatu daerah, berarti pembangunan yang dilaksanakan lebih berpihak kepada segelintir orang kaya, sedangkan orang miskin tidak menikmatinya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Banyak ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator ketimpangan distribusi pendapatan penduduk. Namun pada kajian ini dibatasi pada ukuran ketimpangan distribusi

pendapatan dengan ukuran kuantitatif yang digambarkan dalam Kurva Lorenz, Gini Rasio dan Kriteria Bank Dunia yang umum digunakan karena keterbatasan data yang tersedia. Ukuran-ukuran tersebut merupakan ukuran besar kecilnya bagian pendapatan yang diterima oleh penduduk. Disamping ukuran ketimpangan distribusi pendapatan, kajian ini juga dimaksudkan melihat kondisi kemiskinan penduduk dengan metode Garis Kemiskinan Yogyakarta.

Kajian ini bertujuan untuk mengamati tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk di daerah Yogyakarta pada tahun 2010, dibandingkan dengan ketimpangan pada tahun sebelumnya.

1.3 Manfaat

Indikator ketimpangan distribusi pendapatan dapat digunakan sebagai bahan untuk menelaah berbagai kemungkinan yang dapat ditawarkan dalam analisis ekonomi untuk memecahkan persoalan ketimpangan dan kemiskinan. Kajian ini juga dapat digunakan untuk menggali kebijakan alternatif yang akan diterapkan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan di wilayahnya.

1.4 Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2010. Data mengenai pendapatan rumahtangga/penduduk sangat sulit didapat, untuk itu penghitungan distribusi pendapatan dilakukan dengan pendekatan pengeluaran konsumsi rumahtangga/penduduk yang didapat dari data Susenas. Pengukuran distribusi pendapatan menggunakan pendekatan pengeluaran sebagai proksi pendapatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca mengikuti alur pembahasan, materi dalam buku ini dibagi dalam empat bab. Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang yang mendeskripsikan pendapat para pakar/pengamat ekonomi dalam permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan penduduk dan kemiskinan, serta tujuan dan sistematika penulisan. Bab II Metode Analisis, mengupas secara singkat ukuran yang digunakan dan metode yang

digunakan, serta paparan teoritis tentang ketimpangan distribusi pendapatan penduduk. Bab III. Pembahasan, merupakan inti dari publikasi ini, yang menganalisis hasil penghitungan ketimpangan distribusi pendapatan penduduk berdasarkan Kurva Lorenz, Gini Rasio dan Kriteria Bank Dunia. Bab IV Kesimpulan, berupa kesimpulan atau ringkasan dari hasil analisis masing-masing metode pengukuran.

<https://jogjakota.bps.go.id>

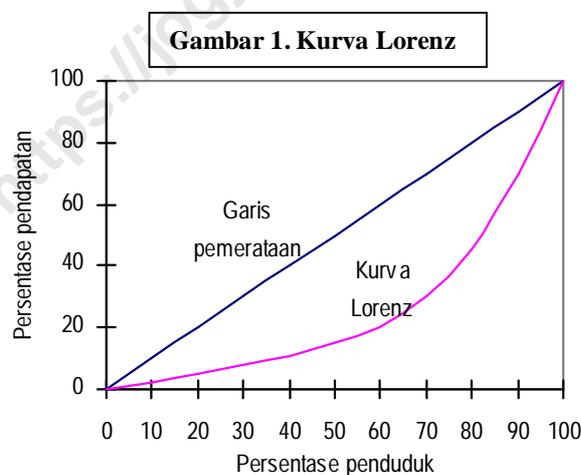
BAB II

METODE ANALISIS

Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu daerah di kalangan penduduknya. Ada beberapa cara yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur pemerataan distribusi pendapatan, diantaranya yaitu :

2.1 Kurva Lorenz

Kurva Lorenz diambil dari nama Conrad Lorenz, seorang ahli statistik Amerika yang pada tahun 1905 menemukan diagram yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan menurut kelompok-kelompok penduduk yang juga dihitung secara kumulatif. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujursangkar dimana sisi vertikal melambangkan persentase kumulatif pendapatan dan sisi horizontal mewakili persentase kumulatif penduduk sebagai penerima pendapatan.



Penentuan tingkat ketimpangan berdasarkan Kurva Lorenz dilihat dari jarak kurva ini ke garis diagonal. Semakin dekat jarak Kurva Lorenz ke garis diagonal (kurvanya makin menyerupai garis lurus) menyiratkan distribusi pendapatan yang makin merata. Sebaliknya bila kurva semakin jauh dari garis diagonal menunjukkan distribusi pendapatan penduduk yang semakin timpang.

Pembuatan Kurva Lorenz dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengurutkan data pengeluaran dari nilai terkecil hingga terbesar.
2. Menentukan desil pertama hingga ke sepuluh pada distribusi data pengeluaran
3. Menghitung besarnya nilai pendapatan pada masing-masing kelompok desil
4. Menentukan kumulatif pendapatan pada masing-masing kelompok desil.
5. Menghitung persentase kumulatif pendapatan dari masing-masing desil
6. Memetakan dalam plot dua dimensi antara masing-masing desil sebagai sisi horisontal dengan nilai persentase kumulatif pendapatan pada sisi vertikal.

2.2 Gini Rasio (*Gini Rasio*)

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Gini Rasio. Ide dasar perhitungan Gini Rasio sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva (yang kemudian dinamakan Kurva Lorenz) yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Secara ilustrasi, luas kurva Lorenz merupakan luas daerah di bawah garis diagonal yang dibatasi dengan kurva pada suatu persegi empat. Perbandingan atau rasio antara luas daerah Kurva Lorenz dengan luas daerah di bawah garis diagonal dapat diperoleh nilai Gini Rasio. Secara matematis, untuk menghitung Gini Rasio dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

Keterangan : P_i = Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke-i

Q_i = Persentase kumulatif jumlah pengeluaran kelas pengeluaran ke-i

k = Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk.

Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Menurut Oshima, nilai Gini Rasio dibagi menjadi tiga tingkatan. Nilai Gini Rasio kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan

yang rendah, nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori moderat, dan nilai lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan yang tinggi.

Secara ringkas penghitungan Gini Rasio adalah sebagai berikut (Lampiran 2):

1. Membuat kelas pengeluaran penduduk berdasarkan data Susenas, diisikan pada kolom (1).
2. Menghitung jumlah penduduk menurut kelompok pengeluaran dan diisikan pada kolom (2).
3. Menghitung persentase jumlah penduduk dan diisikan pada kolom (3).
4. Menghitung nilai pendapatan penduduk pada masing-masing kelompok pengeluaran dan diisikan pada kolom (4).
5. Menentukan kumulatif pendapatan hingga kelas ke-i dan diisikan pada kolom (5).
6. Menghitung persentase kumulatif pendapatan dan diisikan pada kolom (6).
7. Menambahkan kumulatif pendapatan pada kelompok pengeluaran ke-i dengan kelompok pengeluaran ke-(i-1) dan diisikan pada kolom (7).
8. Mengalikan nilai pada kolom (3) dengan kolom (7) dan diperoleh nilai pada kolom(8).
9. Menjumlahkan seluruh nilai pada kolom (8) dan dibagi dengan 10.000
10. Nilai Gini Rasio diperoleh dengan mengurangi angka satu dengan nilai perhitungan pada langkah ke-9.

2.3 Kriteria Bank Dunia

Ukuran lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan penduduk adalah Kriteria Bank Dunia. Ukuran ini membagi penduduk menjadi tiga kelompok pendapatan yakni kelompok 40 persen berpendapatan terendah, 40 persen berpendapatan menengah dan 20 persen berpendapatan tertinggi.

Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan diukur dengan besarnya bagian pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah dengan batasan sebagai berikut :

- 2.3.1 Tingkat ketimpangan rendah jika 40 % penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan.

2.3.2 Tingkat ketimpangan moderat jika 40 % penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12 hingga 17 persen jumlah pendapatan.

2.3.3 Tingkat ketimpangan tinggi jika 40 % penduduk berpendapatan terendah menerima kurang 12 persen jumlah pendapatan.

Langkah-langkah untuk melakukan penghitungan ukuran ketimpangan pendapatan berdasarkan Kriteria Bank Dunia sebagai berikut :

1. Mengurutkan data pengeluaran dari terkecil hingga terbesar.
2. Menentukan nilai desil ke-4 dan ke-8 pada distribusi data pengeluaran.
3. Nilai pengeluaran yang kurang dari desil ke-4 dikelompokkan sebagai penduduk berpendapatan terendah, nilai antara desil ke-4 hingga 8 masuk pada kelompok moderat dan nilai pengeluaran diatas desil ke 8 masuk dalam kategori berpendapatan tertinggi.
4. Menghitung jumlah penduduk dan nilai pengeluaran pada masing-masing kelompok sebagaimana kriteria pada langkah ke-3.
5. Menghitung persentase pendapatan pada masing-masing kelompok.
6. Menentukan tingkat ketimpangan berdasarkan kriteria Bank Dunia yang difokuskan pada kelompok 40 % penduduk berpendapatan terendah.

BAB III

PEMBAHASAN

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan atau kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak daerah otonom. Berawal dari distribusi pendapatan yang tidak merata yang kemudian memicu terjadinya ketimpangan pendapatan sebagai dampak dari kemiskinan. Hal ini akan menjadi sangat serius apabila kedua masalah tersebut berlarut-larut dan dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi sosial yang dampaknya cukup negatif. Oleh karena itu pembangunan yang dilakukan diharapkan tidak hanya untuk mencapai target tingkat pertumbuhan, tetapi juga menghasilkan pemerataan bagi masyarakat.

Kemiskinan berkaitan erat dengan kemampuan mengakses pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi dan kalori serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Oleh karenanya diperlukan informasi yang jelas tentang pola konsumsi masyarakat terutama melalui peningkatan akses terhadap informasi tentang permasalahan ini.

Komposisi pengeluaran penduduk dapat dijadikan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Semakin kecil pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan merupakan indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan Makanan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Di banyak wilayah yang sedang berkembang, pemenuhan kebutuhan makanan masih menjadi prioritas utama, karena untuk memenuhi kebutuhan gizi.

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Rata-rata pengeluaran rumah tangga didapat dengan membagi jumlah seluruh pengeluaran rumah tangga baik makanan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lainnya dengan jumlah anggota rumah tangga keseluruhan. Rata-rata pengeluaran rumah tangga dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan dari rumah tangga yang bersangkutan.

3.1 Pola Konsumsi

Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Tabel 1. Persentase Penduduk dan Total Pengeluaran menurut Kelompok Barang dan Pengeluaran di Kota Yogyakarta Tahun 2010

Kelompok Pengeluaran	Kelompok Barang				Jumlah	
	Makanan		Non Makanan		Persentase Penduduk	Pengeluaran (Juta)
	Persentase Penduduk	Pengeluaran (Juta)	Persentase Penduduk	Pengeluaran (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<199.999	11,70	7.110,88	24,14	11.535,29	0,82	928,75
200.000 – 299.999	30,65	29.547,53	16,50	15.604,26	10,38	6.595,11
300.000 – 399.999	24,29	32.675,46	12,19	16.457,25	11,70	12.943,38
400.000 – 599.999	17,95	32.708,14	18,84	36.215,73	17,57	45.208,01
600.000 – 699.999	4,02	10.097,28	7,19	18.006,18	11,42	14.478,16
700.000 – 799.999	4,28	12.571,33	4,02	11.671,79	5,87	25.863,85
>800.000	7,11	26.242,18	17,12	77.620,42	31,31	232.046,46
Total	100,00	150.952,79	100,00	187.110,92	100,00	338.063,71

Sumber : Susenas 2010, diolah

Persentase penduduk Kota Yogyakarta terbesar untuk pengeluaran makanan, terdapat pada kelompok pengeluaran < 200.000 - 299.999 rupiah, yaitu mencapai 30,65 persen sedangkan untuk non makanan pengeluaran terbesar terjadi pada kelompok pengeluaran < 199,999 yang mencapai 24,14 persen. Dari 30,65 persen penduduk yang mengkonsumsi makanan pada kelompok pengeluaran 200.000 – 299.999 rupiah ternyata

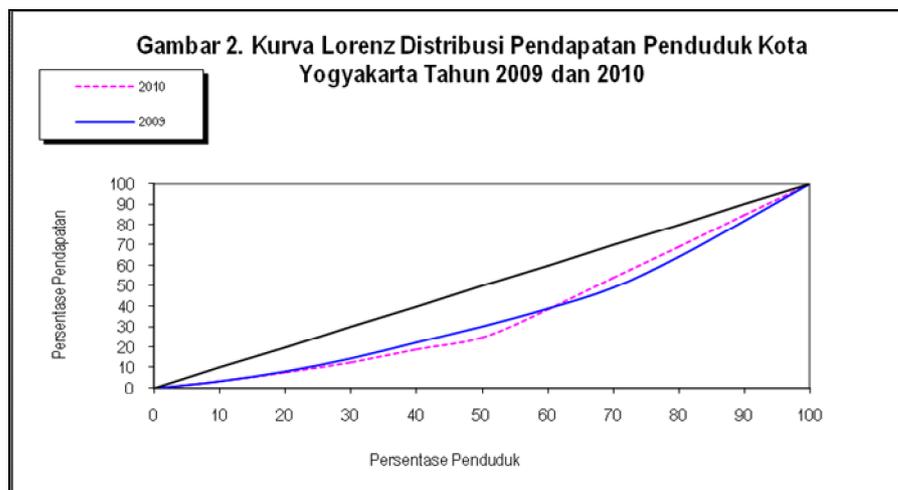
hanya 16,50 persen mengkonsumsi non makanan, sisanya 14,15 persen mengkonsumsi non makanan pada kelompok pengeluaran lainnya.

Pada kelompok pengeluaran > 800.000 rupiah, persentase penduduk yang mengkonsumsi makanan sebanyak 7,11 persen dengan nilai pengeluaran mencapai 26,242 milyar rupiah, sedangkan pada kelompok pengeluaran yang sama persentase penduduk yang mengkonsumsi non makanan ada 17,12 persen dengan total pengeluarannya mencapai 77,620 milyar rupiah.

Dari total pengeluaran untuk makanan mencapai 150,592 milyar atau mencapai 44,65 persen dan untuk pengeluaran non makanan mencapai 187,111 milyar rupiah atau mencapai 55,35 persen dari seluruh pengeluaran yang dikonsumsi oleh penduduk Kota Yogyakarta. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa konsumsi non makanan penduduk Kota Yogyakarta lebih besar dibandingkan konsumsi makanan.

3.2 Kurva Lorenz

Pergeseran yang terjadi pada Kurva Lorenz cukup signifikan, sehingga pola yang tampak pada Gambar 2 menunjukkan bahwa pendapatan penduduk Kota Yogyakarta yang diukur melalui pengeluaran per kapita tahun 2010, memberikan gambaran bahwa tingkat pemerataan pendapatan dari penduduk Kota Yogyakarta lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, yang terindikasi Kurva Lorenz di tahun 2010 semakin dekat jaraknya ke garis diagonal yang menyiratkan distribusi pendapatan yang makin merata.



Mengingat bahwa Kurva Lorenz tidak menunjukkan suatu nilai kuantitatif, maka seberapa besar pergeseran kurva tersebut tidak terukur. Ukuran secara kuantitatif akan dijelaskan pada sub bab berikutnya, yaitu dengan indikator Gini Rasio.

3.3 Gini Rasio (*Gini Rasio*)

Visualisasi dengan Kurva Lorenz menjelaskan distribusi pendapatan penduduk tanpa memberikan nilai kuantitatif yang dapat dibandingkan. Dengan Gini Rasio, ukuran tinggi atau rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan penduduk secara kuantitatif, lebih dibandingkan.

Pada tahun 2010, Gini Rasio Kota Yogyakarta tercatat 0,2717, lebih rendah 0,0055 poin dibanding dengan Gini Rasio pada tahun 2009. Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2010 lebih merata dibanding tahun 2009.

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan penduduk kota Yogyakarta dari tahun 2006 sampai dengan 2010 semakin merata, yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduknya. Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa pemerintah kota Yogyakarta telah melaksanakan pembangunan yang hasilnya telah dapat dinikmati oleh penduduk kota Yogyakarta, baik oleh penduduk yang berpenghasilan tinggi maupun penduduk yang memiliki ekonomi rendah. Namun demikian pemerataan tersebut belum mencapai maksimal.

Tabel 2. Gini Rasio dan Tingkat Ketimpangan di Kota Yogyakarta Tahun 2006-2010

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gini Rasio	0,3184	0,2899	0,2798	0,2772	0,2717
Kriteria	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber : Susenas, diolah

3.4 Kriteria Bank Dunia

Pemerataan pendapatan masyarakat, sebagai suatu sasaran merupakan masalah yang sulit dicapai, padahal pengamatan mengenai fenomena tersebut sangat diperlukan, sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Bank Dunia memberikan 3 (tiga) kriteria penyebaran pendapatan penduduk yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Menurut Kriteria Bank Dunia, jika 40 persen penduduk terendah memperoleh : kurang dari 12 persen dari total pendapatan maka distribusi pendapatan dikatakan buruk (tingkat ketimpangan tinggi); antara 12 persen sampai dengan 17 persen dikatakan berketimpangan sedang; lebih dari 17 persen berketimpangan rendah.

Kelompok yang menjadi fokus dalam penghitungan berdasar Kriteria Bank Dunia adalah kelompok 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok ini menunjukkan distribusi pendapatan penduduknya semakin merata.

Pada tahun 2010 kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah di Kota Yogyakarta menikmati 18,95 persen pendapatan. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia bagian pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah ini tergolong tinggi, sehingga termasuk pada kategori ketimpangan rendah.

Meskipun begitu, 40 persen penduduk lapisan sedang/menengah dan 20 persen penduduk lapisan atas/tinggi masih menerima pembagian pendapatan relatif lebih tinggi dibandingkan 40 persen penduduk terendah. yaitu 50,33 dan 30,72 persen dari total pendapatan.

Tabel 3. Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia menurut Kelompok Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2008 – 2010.

Kelompok Penduduk	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
40% Penduduk Berpendapatan Terendah	20,98	22,17	18,95
40% Penduduk Berpendapatan Menengah	45,32	41,97	50,33
20% Penduduk Berpendapatan tertinggi	33,70	35,85	30,72

Sumber Susena 2010, diolah

Dampak kemajuan pembangunan lebih dirasakan untuk penerima pendapatan kelompok sedang dan tinggi. Idealnya untuk kelompok penerima pendapatan sedang dan tinggi mampu mentransfer ke kelompok penerima pendapatan rendah sehingga akan lebih merata.

<https://jogjakota.bps.go.id>

IV. PENUTUP

1. Pola Konsumsi Penduduk Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa konsumsi non makanan lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi makanan.
2. Dengan menggunakan Kurva Lorenz terlihat bahwa ketimpangan distribusi pendapatan penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2010 mengalami perubahan tingkat pendapatan kearah yang lebih baik, jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2009.
3. Dengan ukuran Gini Rasio diperoleh bahwa distribusi pendapatan penduduk di Kota Yogyakarta semakin merata pada tahun 2010, yaitu dengan nilai mencapai 0,2717.
4. Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, jika 40 persen penduduk terendah memperoleh : 17 persen dari total pendapatan maka distribusi pendapatan dikatakan berketimpangan rendah. Pada tahun 2010 kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah di Kota Yogyakarta menikmati 18,95 persen pendapatan atau termasuk dalam kategori ketimpangan rendah.
5. Beberapa pilihan kebijakan penanggulangan ketimpangan dan kemiskinan yang dikemukakan oleh para ekonom dapat menjadi alternatif dalam perencanaan program Pemerintah Kota Yogyakarta. Diharapkan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat terus memberikan perhatian khusus dalam upaya mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Bukan hanya Pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat juga perlu ikut berperan aktif, agar kaum miskin tidak semakin terpinggirkan, dan apa yang dicita-citakan dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

BPS, "Pola Konsumsi Rumahtangga, Jakarta

BPS, 2004, "Pengeluaran Penduduk, Distribusi Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan, Jakarta

Dumairy, 1996, "*Perekonomian Indonesia*", Penerbit Erlangga, Jakarta.

Prijono Tjiptoherijanto, 1998, Kesenjangan, Jakarta

Rhyme, 2007, "distribusi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan, Jakarta

<https://jogjakota.bps.go.id>

MENCERDASKAN BANGSA

DATA

<https://logdata.bps.go.id>